



## Hindari Suap, KPK Beri Simulasi Pegawai Dinzin

**YOGYA, TRIBUN** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan pelatihan sekaligus simulasi antikorupsi kepada para pegawai Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Yogyakarta, kemarin (24/3). Dinzin dinilai sebagai SKPD yang rentan tersangkut tindak pidana korupsi.

Fungsional Deputi Pencegahan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Mohammad Jhanattan, mengatakan, praktik suap sangat rawan terjadi di ranah perizinan. Sehingga kehadiran KPK bertujuan untuk mengajak para pegawai Dinzin Kota Yogyakarta mengenal tindakan korupsi dan pencegahannya.

"Dinzin Kota Yogyakarta masuk sebagai lima besar layanan perizinan terbaik versi KPK di seluruh Indonesia. Sehingga hal-hal seperti ini harus dipertahankan dengan menjaga integritas. Sembari kami juga melakukan evaluasi dan monitor," kata Jhanattan, Selasa (24/3).

Ranah perizinan, lanjutnya, sangat rawan untuk terjerumus dalam tindak korupsi. Terlebih di Yogyakarta mulai banyak pengajuan izin hotel dan bangunan serupa lainnya.

Menurut Jhanattan, temuan kasus suap hingga 2015 mencapai 400 kasus. Paling banyak berupa kasus suap, *mark up* barang dan jasa, serta penurunan spesifikasi.

Namun meski begitu, pemahaman pegawai di Dinzin Kota Yogyakarta mengenai praktik yang mengarah pada tindak pidana korupsi sudah mencapai sekitar 80 persen. "Jika ada pihak yang memberikan sesuatu sebaiknya ditolak saja. Karena dampaknya tidak hanya sesaat tetapi juga dalam jangka panjang," katanya.

Dalam simulasi ini, KPK juga mem-



TRIBUN JOGJA/PRESIDIA KYU

**BUS ANTIKORUPSI** - Karyawan Dinzin Kota Yogyakarta mencoba aplikasi simulasi antikorupsi di Bus Antikorupsi milik KPK, Selasa (24/3). Aplikasi ini bisa membantu untuk mengenal apa saja bentuk-bentuk gratifikasi.

kan untuk melakukan simulasi. Pada simulasi antikorupsi, para pegawai Dinzin Kota Yogyakarta dikenalkan pada aplikasi yang memungkinkan untuk belajar mengenai bentuk-bentuk gratifikasi.

**Rentan Praktik Korupsi**

Kepala Dinzin Kota Yogyakarta, Heri Karyawan, menyadari bahwa dinas di bawah kepemimpinannya tersebut memang rentan dengan praktik-praktik korupsi. Oleh karena itu ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk menghindari praktik suap.

Heri menegaskan, Dinzin Kota Yogyakarta sudah berkomitmen untuk selalu memberi kepastian keluarnya izin kepada seluruh pemohon. Sehingga tidak ada yang didahulukan ataupun ditunda.

"Jika pemohon izin yang datang ke kantor kami tidak bisa melengkapi berkas-berkas untuk mengurus izin, jelas kami akan menolak mengeluarkan izin. Dalam penolakan tersebut juga akan diberitahu alasannya. Jadi tidak akan ada penundaan," kata Heri.

Begitu juga ketika pemohon izin sudah memenuhi syarat pengajuan dengan lengkap, maka izin yang diperlukan pun akan segera dikeluarkan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perwal. (fiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005